

## PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI PILAR PENINGKATAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI YAYASAN SABILUR ROSYAD SIDOARJO

Muawanah  
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto  
E-mail: [anadarto54@gmail.com](mailto:anadarto54@gmail.com)

### ABSTRACT

*Empowerment of waqf can be done by professional professionals by means of building buildings on waqf land then renting out the building and the results can be used for the benefit of the people. Along with the need for funds for poverty alleviation, development and improvement of institutions, then came the thought to represent with money. Money is more flexible and knows no distribution boundaries. One form of productive endowments is cash endowments usually in the form of cash given by endowments to those entitled to receive it through the hands of amil zakat institutions, donations and alms or it can also be with securities such as checks. The person who receives the Waqf Certificate is a proof that he is a member of the Waqf. After the money or check is received, then the cash is usually used for productive endowments by playing for businesses or establishing institutions as long as it does not reduce the value and content of endowments. This paper seeks to examine the extent of the potential for productive endowments, especially in Indonesia, especially at the Sabilur Rosyad Sidoarjo Foundation. In addition, it is also to obtain a more in-depth study of productive waqf law in the Islamic view and also to get the right formula in optimizing the prospect of waqf, by directed to productive waqf.*

**Keywords:** *Empowerment, productive Waqf.*

### ABSTRAK

*Pemberdayaan wakaf dapat dilakukan oleh nazir yang professional dengan cara seperti membangun gedung diatas tanah wakaf kemudian menyewakan gedung tersebut dan hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan umat. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan, pengembangan dan peningkatan lembaga, maka muncullah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Salah satu bentuk wakaf produktif adalah wakaf tunai biasanya berupa uang tunai yang diberikan oleh pewakaf kepada yang berhak menerimanya melalui tangan lembaga amil zakat, infak dan sedekah atau bisa juga dengan surat berharga seperti cek. Pewakaf mendapatkan Sertifikat Wakaf Tunai sebagai bukti bahwa ia telah berwakaf. Setelah uang atau cek tersebut diterima, kemudian uang tunai itu biasanya dimanfaatkan untuk wakaf produktif dengan diputar untuk usaha atau mendirikan lembaga sepanjang tidak mengurangi nilai dan kadar benda wakaf. Tulisan ini berusaha mengkaji sejauh mana potensi wakaf produktif, terutama di Indonesia khususnya di Yayasan Sabilur Rosyad Sidoarjo. Selain itu juga untuk mendapatkan kajian lebih mendalam tentang hukum wakaf produktif dalam pandangan Islam dan juga untuk mendapatkan formula yang tepat dalam mengoptimalkan prospek cerah wakaf, dengan diarahkan ke wakaf produktif*

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan, Wakaf produktif.*

## PENDAHULUAN

Wakaf produktif pada dasarnya merupakan implementasi tujuan wakaf yaitu kemaslahatan melalui model-model usaha ekonomi yang produktif, sehingga manfaat dari harta wakaf dapat berdaya guna secara optimal dan berkesinambungan. Untuk merealisasikan wakaf produktif maka paling tidak mempertimbangkan empat azas yaitu azas keabadian manfaat, azas pertanggungjawaban, azas profesionalitas manajemen, dan azas keadilan sosial. Selain itu empat aspek yaitu pembaharuan paham tentang wakaf, pengembangan sistem manajemen pengelolaan wakaf, sistem manajemen kenaziran dan sistem rekrutmen wakil harus dikembangkan secara proporsional.

Dengan demikian wakaf produktif dapat memanfaatkan tanah-tanah untuk kegiatan-kegiatan ekonomi bernilai tinggi. Atau dilakukan dengan cara wakaf tunai kepada lembaga ekonomi produktif yang amanah untuk kemudian diinvestasikan untuk menciptakan lapangan kerja. Untuk kemajuan pengembangan wakaf, UU mengamanahkan pembentukan badan independent yaitu Badan Wakaf Indonesia yang bertugas, membina *nazir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional dan lain-lain yang untuk pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, badan internasional, organisasi masyarakat, para ahli atau professional dan lain-lain (pasal 49 ayat 1 dan 2) sayangnya Badan Wakaf Indonesia ini baru pada tahun 2006, dan saat ini baru melakukan konsolidasi organisasi.

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*Birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang membedakan dengan sadaqah lainnya adalah ketika wakaf ditunaikan, terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah/umum yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Wakaf akan valid sebagai amal jariyah setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang di wakafkan menjadi aset publik dan hasilnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf tidak akan bernilai amal jariyah, sampai wakaf tersebut benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang/bermanfaat tanpa menggerus hapis aset pokok wakaf melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi

manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.

Sedangkan tujuan wakaf yang esensial adalah *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka beribadah). Karena sifatnya yang demikian, maka sasaran wakaf harus jelas dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Oleh karena itu, wakaf tidak boleh diberikan kepada pelaku maksiat. Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf menghendaki agar harta wakaf itu dikembangkan dan dikelola secara maksimal, tidak hanya dikonsumsi/dipendam tanpa hasil. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dinikmati dan bermanfaat bagi orang lain, akan semakin besar pula pahala yang mengalir kepada pihak wakif. Berdasarkan hal tersebut, dari sisi hukum fiqih, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (nazir). Oleh karena substansi esensial wakaf adalah suatu sistemasi upaya pengakumulasian dana dari masyarakat yang hasil pengembangan dan pengelolaannya untuk masyarakat, maka harta wakaf dilarang untuk dijual, diwariskan, dihibahkan, dialihkan dan dijadikan jaminan. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif terhadap perubahan status harta wakaf dari milik umum menjadi milik pribadi, sehingga wakaf akan tetap selamanya menjadi sumber dana masyarakat secara umum.

## STUDI PUSTAKA

Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Di Indonesia, perwakafan diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 sebelum lahir UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tentang perwakafan Tanah Milik dan sedikit disinggung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *mahdah*, seperti masjid, musholla, pesantren, pemakaman dan lain-lain.

Karena keterbatasan cakupannya, kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi tumbuhnya pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan profesional. Pada tanggal 27 oktober 2004,

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diundangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU tersebut memiliki urgensi ,yaitu selain untuk kepentingan mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan social (kesejahteraan umat).

Terdapat dua macam praktek wakaf yaitu Wakaf *Mutlaq* dan Wakaf *Muqayyad*. Wakaf *mutlaq* adalah praktek wakaf di mana *waqif* menyerahkan sepenuhnya kepada si *naẓir* untuk mengelolanya tanpa batas. Adapun wakaf *muqayyad* adalah wakaf di mana *waqif* mensyaratkan agar harta yang diwakafkan itu hanya boleh dikelola dengan cara tertentu dan diberikan kepada pihak tertentu. Dalam praktek wakaf *mutlaq*, *naẓir* lebih leluasa melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal. Secara historis, cara yang banyak ditempuh, sesuai dengan informasi dalam buku-buku fikih, adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. Hal ini sejalan dengan kenyataannya bahwa kebanyakan harta wakaf adalah dalam bentuk *al-'iqar* (harta tak bergerak, seperti lahan pertanian dan bangunan).

Ada beberapa bentuk penyewaan yang terdapat dalam konsep fikih:

1. Sewa biasa (*ijarah*). Dengan pertimbangan kemaslahatan harta wakaf, para ulama mazhab yang empat sepakat membolehkan mempersewakan harta wakaf, meskipun mereka berbeda dalam beberapa hal.
2. Akad sewa menyewa ganda (*'aqd al-ijaratain*). Akad sewa ganda ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan modal untuk membangun bangunan di atas sebidang tanah wakaf. Untuk memperoleh modal, diadakan kontrak sewa dengan seorang penyewa untuk jangka waktu lama, dengan dua tingkat sewa menyewa. Sewa pertama dibayar lebih dulu sejumlah yang memungkinkan untuk membangun bangunan dimaksud. Sedangkan sewa kedua merupakan sewa bulanan dengan harga yang lebih murah yang harus dibayar selama menghuni rumah. Sewa kedua ini masih diperlukan untuk menghindari kemungkinan ada klaim dari penyewa bahwa rumah itu telah dibelinya.
3. *al-Hikru*, yaitu sebuah akad sewa menyewa tanah wakaf untuk masa waktu yang lama, serta memberi hak kepada penyewa untuk mendiami tanah itu, untuk membangun atau bercocok tanam di atas lahan pertanian dan

memberinya hak untuk memperpanjang masa sewa setelah kontrak pertama habis, selama ia masih mampu membayar sewa pasaran.

4. *al-Marshid*, yaitu sebuah kesepakatan dengan calon penyewa yang bersedia meminjami *naẓir* sejumlah dana untuk memperbaiki bangunan wakaf sebagai hutang yang kemudian akan dibayar dengan sewa harta wakaf itu sendiri.
5. Pengembangan hasil sewa wakaf dengan membelikannya kepada benda yang bisa menghasilkan, misalnya dengan memodali pembangunan gedung yang kemudian dapat disewakan lagi.
6. Dengan melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian wakaf di samping dengan mempersewakannya kepada pihak yang punya modal, juga mungkin dengan kerjasama *muzara'ah*.

Wakaf menurut UU Nomor 41 tahun 2004 pasal 16 dapat berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan tanaman, dan benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan sebagainya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur dalam pasal 42 sampai pasal 46 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam pasal 42 dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah kewajiban *naẓir*, sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta benda wakaf tersebut yang telah diikrarkan oleh *waqif*. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.

Selanjutnya dalam pasal 43 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dan harus sesuai dengan prinsip *shari'ah*. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan atau sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan *shari'ah*.

Wakaf yang disyariatkan dalam Islam memiliki dua dimensi manfaat, pertama dimensi religi, yaitu wakaf merupakan suatu amal jariyah yang menjadi anjuran agama dan perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena wakaf dianggap sebagai amal jariyah, maka terdapat konsekuensi bahwa harta tersebut harus dikelola secara baik sehingga manfaatnya dapat dinikmati untuk selamanya. Kedua dimensi social ekonomi yaitu kegiatan wakaf melalui sadaqah para dermawan memiliki peran yang besar dalam menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan perekonomian umat. Wakaf tunai juga dinilai menjadi jalan alternatif untuk peningkatan lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya dan di Yayasan Pendidikan Sabilur Rosyad khususnya.

Pengelolaan dana wakaf harus disadari merupakan pengelolaan dana publik yang manfaatnya pun akan disalurkan kembali kepada public. Oleh karena itu, tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi juga budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan faktor yang harus diwujudkan. Pentingnya budaya ini ditegaskan karena satu sisi hak wakif atas asset (wakaf tunai) telah hilang, sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang professional, transparansi serta akuntabilitas, maka beberapa hak wakif seperti:

- a. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa.
- b. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ jasa
- c. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen sedikit banyak akan dapat dipenuhi

Ada beberapa strategi penting untuk optimalisasi wakaf produktif dalam rangka peningkatan lembaga pendidikan dan pemberdayaan serta kesejahteraan umat yaitu:

- 1). Optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf tunai. Seluruh komponen umat agar terus mendakwakan konsep, hikmah dan manfaat wakaf tunai kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 2). Tindakan riil operasional wakaf uang melalui pilot project (proyek percontohan), misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarannya dibangun diatas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam

perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relative murah.

- 3). Pendidikan dan pelatihan (diklat) tentang manajemen pengelolaan wakaf tunai. Hal ini penting, karena wakaf merupakan asset publik yang harus dikelola dan dikembangkan secara professional agar wakaf menjadi sumber dana yang produktif bagi umat dan Negara.

Terdapat empat syarat sahnya wakaf atau disebut juga sebagai rukun wakaf yaitu :

1. Mengenai orang yang melakukan perbuatan wakaf (*al-waqif*) hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan di mana jiwanya tertekan.
2. Mengenai harta benda yang akan diwakafkan (*al-mawquf*) harus jelas wujudnya atau dzatnya, di samping harta itu bersifat tidak cepat habis. Artinya, bahwa harta itu tidak habis sekali pakai. Ia harus bersifat kekal dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang kekal pula.
3. Mengenai sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf (*al-mawquf 'alaih*) dapat dibagi menjadi dua macam: wakaf khairiyah dan wakaf dzurriyah. Wakaf *khairiyah* adalah wakaf di mana *waqifnya* tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf *dzurriyah* adalah wakaf di mana *waqifnya* membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.
4. Mengenai bentuk yang perlu diperhatikan dalam menyatakan harta yang bersangkutan sebagai wakaf disebut *sighah*.

Disamping itu ada persyaratan *nazir* (pengelola harta wakaf). Beberapa hal yang diatur dalam UU wakaf mengenai nadzir wakaf yaitu:

- a. Selain perorangan, terdapat penekanan berupa badan hukum dan organisasi, sehingga dengan menekankan badan hukum atau organisasi diharapkan dapat meningkatkan peran-peran *kenaziran* untuk mengelola wakaf secara lebih baik.
- b. Persyaratan *nazir* disempurnakan dengan pembenahan manajemen *kenaziran* secara profesional, seperti: amanah, memiliki pengetahuan mengenai wakaf,

berpengalaman di bidang manajemen keuangan, kemampuan dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas *nazir*. Penambahan persyaratan *nazir* ini diharapkan dapat memaksimalkan pengembangan potensi wakaf yang ada.

- c. Pembatasan masa jabatan *nazir*. Kalau peraturan perundangan sebelumnya tidak mengatur tentang masa kerja *nazir*, dalam UU wakaf ini menjadi point penting agar *nazir* bisa dipantau kinerjanya melalui tahapan-tahapan periodik untuk menghindari penyelewengan dan atau pengabaian tugas-tugas *kenaziran*.
- d. *Nazir* dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, agar *nazir* wakaf tidak sekedar dijadikan pekerjaan sampingan yang hanya dijalani seadanya, tapi benar-benar mau dan mampu menjalankan tugas-tugasnya sehingga mereka patut diberikan hak-hak yang pantas sebagaimana mereka kerja di dalam dunia professional.

Institusi atau lembaga pengelola wakaf pengertiannya berkaitan langsung dan tidak dipisahkan dari upaya-upaya produktif dari aset wakaf. Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh *mawquf ‘alaih*. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak *waqif*. Berdasarkan hal tersebut, dari sisi hukum fikih, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (*nazir*).

Dalam kitab *al-iqna’*, oleh Syams al-Dien Muhammad bin Ahmad al-Syarbaini dijelaskan tugas *nazir* sebagai berikut: “kewajiban dan tugas *nazir* wakaf adalah: membangun, mempersewakan, mengembangkannya agar berhasil dan mendistribusikan hasilnya itu kepada pihak-pihak yang berhak, serta kewajiban memelihara modal wakaf dan hasilnya.”

Dalam kitab Syarh Muntaha al-Adaab oleh Manshur bin Yunus al-Bahuty dijelaskan: “tugas *nazir* wakaf adalah memelihara harta wakaf, membangunnya,



mempersewakannya, menanami lahannya dan mengembangkannya agar mengeluarkan hasil yang maksimal seperti hasil sewa, hasil pertanian dan hasil perkebunan.”

Idris Khalifah, Ketua Forum Ilmiah di Tethwan Magribi, dalam hasil penelitiannya yang berjudul ‘*Istitsmar Mawarid al-Awqaf*’ membeberkan sepuluh tugas *nazir* wakaf sebagai berikut:

- a. Memelihara harta wakaf
- b. Mengembangkan wakaf, dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat
- c. Melaksanakan syarat dari *waqif* yang tidak menyalahi hukum syara’
- d. Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu
- e. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri
- f. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat
- g. Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah, dengan sewa pasaran
- h. Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya
- i. *Nazir* bertanggungjawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya itu.

## GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf sudah dipraktekkan baik dalam bentuk yang masih tradisional atau konvensional, dalam arti bentuk wakaf berupa benda-benda tidak bergerak maupun wakaf produktif berupa wakaf uang atau wakaf tunai (*cash waqf*). Bahkan, wakaf tunai (*cash waqf*) ternyata sudah dipraktekan sejak masa sahabat dan tabi’in. al-Bukhori dalam kitabnya “Shahih al-Bukhari sebagaimana disebutkan Qahar meriwayatkan sebuah athar(perkataan sahabat) dari al-Zuhri (w.124 H) bahwasannya ia telah meminjamkan sepuluh dinar kepada seorang pedagang dan hasilnya diberikan kepada orang-orang miskin. Dijelaskan oleh M Syafi’i Antonio, al-Zuhri adalah salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadits (*tadwin al-hadith*) mengeluarkan fatwa yang berisi anjuran melakukan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwa, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun

caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Dari kasus itulah kemudian muncul berbagai analisis tentang pentingnya wakaf tunai yang dewasa ini digalakkan di beberapa negara Islam di dunia. Syafii juga menjelaskan bahwa paling tidak terdapat empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini :

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas pun bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah (hartawan) terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kadang cash flownya kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
4. Pada gilirannya insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Lebih jauh, Syafi'i mencoba untuk mengilustrasikan betapa pentingnya penggunaan wakaf tunai. Dalam dunia pendidikan misalnya, ia melihat adanya tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika kita hendak menerapkan prinsip wakaf tunai dalam dunia pendidikan:

- a. Alokasi *cash waqf* harus dilihat dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Contohnya adalah anggapan dana wakaf akan “habis” bila dipakai untuk membayar gaji guru atau upah pekerja bangunan, sementara wakaf harus “abadi”. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya, dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pendidikan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya.
- b. Asas kesejahteraan *nazir*: Sudah terlalu lama *nazir* seringkali diposisikan asal-asalan alias *lillahita-Allah* (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib “berpuasa” sebagai akibatnya, seringkali kinerja *nazir* asal-asalan juga.

- c. Asas transparansi (accountability) dimana badan wakaf dan lembaga yang dibutuhkan harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana wakaf kepada umat dalam bentuk audited financial report (laporan keuangan yang sudah diaudit) termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

Bagi masyarakat muslim, wakaf mempunyai nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam pengembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun sangat disayangkan pengelolaan dan pengembangan wakaf agar menjadi sebuah wakaf produktif selama ini hanya dijumpai di sebagian negara saja seperti Arab Saudi, Yordania, Qatar, Kuwait, Mesir, Turki, Bangladesh, dan lain-lain.

Sesuai dengan *qanun* Nomor 80 tahun 1971, badan wakaf ini bertugas untuk mengusut dan melaksanakan semua pendistribusian, serta semua kegiatan-kegiatan perwakafan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Badan ini selain menguasai pengelolaan wakaf juga diberi kewenangan untuk membelanjakan harta wakaf dengan sebaik-baiknya. Misalnya, mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti kegiatan-kegiatan di cabang, membangun dan mengembangkan lembaga wakaf, membuat perencanaan dan melakukan evaluasi akhir dan membuat laporan dan menginformasikannya kepada masyarakat.

Sejauh ini ada berbagai macam harta yang telah dikelola Badan wakaf. Antara lain harta yang dikhususkan pemerintah untuk anggaran umum, barang-barang yang menjadi jaminan hutang, hibah, wasiat, dan sedekah, dokumen, uang/harta yang harus dibelanjakan, dan benda lain yang berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan harta wakaf.

Agar harta-harta ini produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas, Badan wakaf menetapkan beberapa kebijakan;

1. Menitipkan hasil harta wakaf di Bank Islam agar dapat berkembang.
2. Melalui *wizaratu al-Awqaf*, Badan waqaf berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam dan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan,
3. Memanfaatkan tanah-tanah kosong untuk dikelola secara produktif dengan cara mendirikan lembaga-lembaga perekonomian bekerjasama dengan berbagai perusahaan,
4. Membeli saham dan obligasi perusahaan-perusahaan penting

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS KONSEP

Aset-aset Yayasan Sabilur Rosyad pada dasarnya tidak seluruhnya terkumpul dari hasil wakaf, akan tetapi ada yang berasal dari shadaqoh jariyah atau amal jariyah dan kekayaan pribadi pengasuh Yayasan Sabilur Rosyad. Pada penelitian di lapangan (Yayasan Sabilur Rosyad Sidoarjo) didapatkan bahwa bentuk-bentuk dan penerapan konsep wakaf sebagai berikut:

- a. Wakaf property; Dikalangan umat Islam, khususnya di Indonesia umumnya wakaf yang banyak dilaksanakan berbentuk tanah dan bangunan (property). Hal ini juga yang dijumpai di Yayasan Sabilur Rosyad Sidoarjo antara lain meliputi; Data sarana dan prasarana.
- b. Wakaf Tunai (cash waqf); Cash waqf atau lebih mudahnya disebut dengan wakaf uang jika ditelusuri dalam sejarah, pada dasarnya sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriah. Dana wakaf tunai yang diperoleh dari para *waqif* (orang yang mewakafkan hartanya) ini dikelola oleh *nazir* (pengelola) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para *waqif* tersebut telah menentukan arah pengalokasian distribusi keuntungan investasi wakaf tersebut, misalnya apakah ke sektor pendidikan, kesehatan, rehabilitasi keluarga, dan sebagainya.

Kemudian sebagian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan pada instrumen atau lembaga keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah. Selain itu juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru yang mampu mengurangi ketergantungan rakyat kepada tengkulak. Bentuk investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor usaha yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru. Dengan wakaf uang ini, lembaga pengelola wakaf (*nazir*) dapat dengan mudah menggunakan uang tersebut untuk dijadikan bisnis produktif. Kemudian hasil tersebut akan digunakan untuk kepentingan umat Islam secara luas.

Selanjutnya wakaf uang atau wakaf tunai lebih memberikan variasi dalam hal benda wakaf, tidak hanya benda tidak bergerak, tapi juga benda yang bergerak, khususnya uang. Selama ini, masyarakat beranggapan bahwa benda wakaf hanya

terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah wakaf, bangunan, mushaf al-Qur'ān atau benda tidak bergerak lainnya. Dengan wakaf uang ini, masyarakat diberikan kebebasan memilih benda wakaf, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tanah atau bangunan untuk diwakafkan. Ia bisa menyumbangkan uangnya untuk diwakafkan.

Wakaf uang juga dilakukan di Yayasan Sabilur Rosyad. Yaitu berupa dana sumbangan yang diperoleh dari wali murid pada setiap tahun ajaran baru dan sumbangan lain dari masyarakat sekitar. Sejak lama Yayasan Sabilur Rosyad sudah menerapkan wakaf uang kepada wali murid pada setiap tahun ajaran baru, para wali murid telah menyisihkan sebagian uangnya untuk diwakafkan atau sadaqah. Uang tersebut oleh Yayasan digunakan untuk proyek pembangunan gedung-gedung baru. Begitu juga masyarakat sekitar sebagian dari mereka telah memberikan rizki ke Yayasan untuk diwakafkan dan hartanya dimanfaatkan dan dikelola oleh Yayasan. Dengan demikian kami dapat simpulkan bahwa di yayasan ini telah menerapkan wakaf tunai walaupun belum memenuhi prosedur secara profesional.

## KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bentuk wakaf produktif di Yayasan Pendidikan Sabilur Rosyad yaitu : Wakaf property (berbentuk tanah dan bangunan) dan wakaf tunai (cash waqf) yaitu berupa uang tunai. Adapun Pengelolaan harta wakaf di Yayasan Sabilur Rosyad Sidoarjo Adalah aset wakaf berupa asset tanah dikelola dan dibangun untuk gedung-gedung sekolah. Gedung-gedung tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya , tetapi ada sebagian dari gedung yang disewakan yaitu gedung lantai tiga yang terdiri dari 4 ruang untuk kelas belajar, 1 ruang untuk kantor dan 2 ruang kamar mandi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah M. bin Qasim as-Syafi'i, Syamsudin, *Fath al-Qarib*, terj I, Imron Abu Amar, Jilid I. Kudus: Menara Kudus, 1983
- Ali, Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* Jakarta: UI Press, 1988
- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif, diterbitkan oleh : Mumtaz Publishing Depok Cet. V.
- Ansari Zakaria, *Tuhfatutthullab* ,Surabaya: Maktabah Salim bin Nabhan, 1957

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Abi Ishaq as-Sairasi, *al-Muhadhad* juz 1, Mesir: Isa-al-babi al-Halabi,
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan praktek*, Jakarta: PT Raneka Cipta, 2002
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Munawair* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1683
- Ahmad Mannan Muhammad, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: Ciber PKTTI UI, 2001
- Dumper Michael, *Islam and Israel: Muslim Religious Endowments and The Jewish State*, Amerika : Institute for Palestine Studies, 1994
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota
- Djunaidi, Ahmad, Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006
- Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 2003, 88.
- Dokumen Profil TK Plus Sabilur Rosyad Sidoarjo thn 2010-2011
- Dokumen Profil SD Plus Sabilur Rosyad Sidoarjo thn 2010-2011
- Dokumen Profil SMP Plus Sabilur Rosyad Sidoarjo thn 2010-2011
- Dokumen Profil SMK Plus Sabilur Rosyad Sidoarjo thn 2010-2011
- Fikri Ali, *al Mu'amalat al Maaliyyah wa al Adabiyyah*, Kairo: Mustafa alhalabi, 1938
- Faizin, Hamam, *"Mengembangkan Wakaf Produktif di Indonesia"*, *Jurnal Dialog*, No. 70, Tahun XXXIII, Nopember 2010, Jakarta: Balitbang diklat
- Haq Faishal, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, 1993
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia*, Bandung : Yayasan Piara, 1995.
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan lman, 2004
- Langgulong Hasan, *Pendidikan dan Peradapan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1985
- Lutfiadi Mz, *Pengembangan pendidikan dan korelasinya dengan perwakafan di pondok pesantren al-Amin Prenduan Sumenep*, ( Tesis IAIN Surabaya 2008)

- Mohammad Subhan, Wakaf Tunai dan Keuangan Daerah Upaya Progresif dalam Menopang APBD (Tesis IAIN Surabaya 2009)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Perris, 1994
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia Munawair*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- M Shiddiq al-Jawi, "Pembiayaan Pendidikan Dalam Islam" dalam [http:// www. Khalifah 1924.org](http://www.Khalifah1924.org).20 juli 2007
- Muhammad Rawas Qal'ah Jy, *Mausu'ah Fiqh bin Umar Al-Khattab* (Beirut: Dar al-Nafaies, cet 4, 1989.
- Muslim, *Sahih Muslim*, Jus II, Dar Al- Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah Indonesia, tt
- Mughniyah Jawad Muhammad , *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Perris, 1994
- Najim Ibnu , Zainuddin, *Albahr Arraa'iq* (Kairo: Darul kutub alarabiyyah, 1970
- Praja, Juhaya S. *Perwakafan Di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1995
- Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, terbitan: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Depag RI, tahun 2008
- Suyarimbun Irawati , *Tehnik Wawancara dalam Metode Penelitian Survie*, ed. Masri Singarimbun, et. al. Jakarta: LP3ES, 1989
- Suhadi Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* ,Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa 2002
- Suhadi Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* ,Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa 2002
- Tim Depag, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji, 2004 bagian ketiga dan keempat).
- Wirasubrata Burhan , *Wakaf Muslimin di negara Yahudi*, Jakarta: Lentera , 1999
- Zain Alwi Arafat, wakaf tanah atas nama NU (Upaya pengelolaan dan pemberdayaan wakaf tanah di lembaga wakaf dan pertanahan NU (LWPNU) Jawa Timur dalam perspektif UU Nomor 41 tahun 2004) tentang wakaf,(Tesis IANI Surabaya 2007)